

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti yang dilandaskan teori mengenai implementasi kebijakan oleh Van Metter dan Van Horn, bahwa di dalam teori tersebut terdapat enam aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah implementasi kebijakan teori ini terdapat sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik, komunikasi, sikap para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam proses implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Musyawarah Tungku Tigo Sajaringan (MTTS) di Kabupaten Solok terutama di Nagari Tanjung Alai Kecamatan X Koto Singkarak dan Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih, dapat disimpulkan bahwa implementasi MTTS merupakan program positif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok untuk menyikapi persoalan sosial budaya di daerah tersebut.

MTTS merupakan wadah berkumpulnya semua elemen masyarakat untuk bermusyawarah dalam membicarakan banyak hal di tingkat nagari (desa adat). Tujuannya untuk menyelesaikan konflik antarmasyarakat dalam hal apapun melalui musyawarah dan untuk mengembalikan identitas Minangkabau sesungguhnya, yaitu musyawarah dan mufakat yang sesuai dengan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Namun, implementasi MTTS di Kabupaten Solok ini masih belum berjalan maksimal, khususnya Nagari Tanjung Alai dan Nagari Paninggahan karena masih ditemukan kendala, baik yang berasal dari internal maupun yang berasal dari eksternal.

Dari enam aspek yang dikemukakan oleh Van Horn dan Van Metter, pada aspek standar dan sasaran yang diinginkan dalam Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2012 tentang implementasi Musyawarah Tungku Tigo Sajaringan (MTTS) di Kabupaten Solok ini sudah hampir berjalan dengan baik. Hal yang perlu dibenahi adalah sosialisasi dan evaluasi oleh pemerintah dan instansi kepada nagari dalam pemahaman terhadap implementasi Musyawarah Tungku Tigo Sajaringan (MTTS) di Kabupaten Solok ini.

Untuk karakteristik agen pelaksana dan disposisi implementor, implementasi MTTS ini telah didukung oleh agen pelaksana yang tepat, yakni instansi-instansi yang ditunjuk oleh bupati yang dibantu oleh Wali nagari dalam pengimplementasian di nagari-nagari serta tidak ada penolakan dari implementor karena pada dasarnya pihak implementor menyadari betul tugas dan tanggung jawabnya untuk menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat.

Selanjutnya, untuk interaksi aktor implementasi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kondisi komunikasi implementor dengan masyarakat. Perbedaan dapat dilihat pada sudut pandang informan, kondisi nagari, dan proses pengaplikasian kebijakan di nagari. Perbedaan mendasar ialah di Nagari Tanjung Alai antara implementor nagari dan masyarakat terjalin komunikasi yang baik untuk memahami MTTS di nagari, sedangkan di Nagari Paninggahan komunikasi antara implementor dengan masyarakat sedikit terkendala karena adanya masalah internal lembaga nagari dan konflik masyarakat dengan pemerintahan nagari. Berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam pnegimplementasian Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2012 tentang Musyawarah Tungku tigo Sajaringan (MTTS) di Kabupaten Solok:

1. Masalah eksternal oleh konflik kecil sebelumnya antara pemerintahan nagari dengan masyarakat. Konflik atau masalah eksternal ini bisa menyebabkan kegagalan dalam pengimplementasian MTTS di Paninggahan. Meskipun masalah eksternal ini sudah sedikit teratasi dengan mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat setempat dengan masyarakat, pemerintahan Nagari Paninggahan harus segera berbenah agar implementasi MTTS di Nagari Paninggahan bisa berjalan dengan baik dan merangkul seluruh lapisan masyarakat.
2. Implementasi Peraturan Bupati tentang MTTS ini pada saat pemerintahan Bupati Solok Periode 2016-2011 telah diganti dengan Pondasi 4 Pilar, dimana MTTS dijadikan sebagai bagian dalam kebijakan tersebut dalam poin ABS-SBK.
3. Ketersediaan sumberdaya yang belum mencukupi yaitu Nagari Tanjung Alai dan Nagari Paninggahan terhadap komunikasi antara implementor. Pada satu sisi, komunikasi dapat dikatakan berjalan dengan baik, namun pada sisi lain, implementor dilanda kebingungan karena tidak ada lagi komunikasi mengenai implementasi MTTS pada masa pemerintahan kepala pemerintahan yang baru di Kabupaten Solok ini.
4. Koordinasi belum bagus dan terdapat banyak masalah, seperti instansi yang tidak bertanggung jawab, koordinasi di nagari tidak bagus, keegoisan masing-masing implementor hingga menyebabkan kurangnya pemahaman implementor terhadap MTTS di Kabupaten Solok.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan untuk menindaklanjuti implementasi perbup nomor 10 tahun 2012.

1. Secara akademis, tahapan dan tujuan dari Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2012 tentang Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan (MTTS) di Kabupaten Solok diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mata kuliah Jurusan Ilmu Politik.
2. Secara praktis, Pemerintahan Kabupaten Solok harus segera berbenah agar implementasi MTTS di Kabupaten Solok bisa berjalan dengan baik dan merangkul seluruh lapisan masyarakat.
3. Pemerintah Kabupaten Solok harus menambah anggaran agar pelaksanaan Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan (MTTS) di nagari dapat terlaksana dengan baik dan tetap dilanjutkan sampai kapanpun di Kabupaten Solok dan masih diperlukan sosialisasi dan pembekalan dari pemerintah kabupaten dan tingkat nagari untuk memberikan pemahaman lebih kepada aktor-aktor implementasi MTTS agar implementasi ini bisa berjalan dengan baik dan bisa dilanjutkan pada tahun berikutnya di Kabupaten Solok.
4. Sistem koordinasi harus dievaluasi secara tuntas oleh Pemerintah Kabupaten Solok dan pihak nagari-nagari supaya proses pengimplementasaan dapat berjalan dengan sempurna dan merangkul seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat. Koordinasi implementor akan sepadan dengan hasil implementasi.